

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini akan menganalisis sikap dan bentuk oposisi partai Gerindra dengan melihat tanggapan dan respons partai Gerindra terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembahasan ini dianalisis melalui teori dari Robert A. Dahl dalam 6 pola oposisi sehingga mampu mengklarifikasi sikap oposisi seperti apa yang diperankan oleh partai Gerindra. Penggunaan teori ini menyesuaikan dengan sistem politik Indonesia yang berkembang.

Tahap *pertama* akan menjelaskan mengenai sikap oposisi partai Gerindra dengan cara menganalisis latar belakang dan platform partai Gerindra melalui perspektif teori yang ada. Tahap *Kedua* akan mendeskripsikan bentuk oposisi partai Gerindra dengan mengambil kesimpulan dari sikap oposisi partai Gerindra yang telah dibahas dan memberikan gambaran bentuk oposisi partai Gerindra secara konkret dalam bentuk data atau dokumen.

A. ANALISIS SIKAP OPOSISI PARTAI GERINDRA PERSPEKTIF POLA OPOSISI

Robert A. Dahl menjelaskan bahwa oposisi yang baik setidaknya memiliki panduan dalam menggerakkan kekuatannya. *Pertama; Cohesion* (Kepaduan), *Kedua; Competitiveness* (Daya Saing), *Ketiga; Location* (Lokasi), *Keempat; Characteristic* (Ciri Khas), *Kelima; Purpose* (Tujuan), *Keenam; Strategy* (Strategi).¹

¹ Robert A. Dahl, Berbagai Pola Oposisi, dalam buku Partisipasi dan Partai Politik, Miriam Budiarmo (Penyunting), hal 122

1. *Cohesion* (Kepaduan)

Sering dijumpai dalam beberapa negara demokratis, bahwa orang atau kelompok yang secara aktif beroposisi setidaknya akan terkonsentrasi dalam satu wadah yaitu organisasi atau partai politik. Sebab, partai politik adalah manifestasi yang paling nyata dan bentuk oposisi yang paling efektif dalam sebuah negara demokratis. Tetapi sampai ke mana oposisi ini terkonsentrasi tergantung kepada sistem partai yang terdapat di suatu negara, di beberapa negara-negara demokrasi, sebagian oposisi berbentuk kelompok dalam partai.

Dalam sistem oposisi seperti di Indonesia misalnya, oposisi tersebar di antara beberapa partai. Dengan demikian, sistem multipartai dianggap sebagai cara yang wajar bagi pemerintah dan oposisi untuk mengatur konflik yang terjadi. Sejahter suatu oposisi memperhitungkan sistem partai di negaranya dalam memilih strategi yang akan dipergunakannya, maka sistem partai yang berbeda-beda haruslah dihubungkan dengan strategi yang berbeda-beda pula.

Partai Gerindra bukan partai yang didasarkan atas kesamaan ideologi antara partai-partai lainnya, partai Gerindra merupakan partai yang mempunyai ciri khasnya. Partai Gerindra adalah partai nasionalis yang tentu memiliki *platform* yang berbeda dengan partai lainnya.

Partai Gerindra merupakan partai yang berpijak dan berpegang teguh pada landasan kedaulatan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disusun dalam jati diri partai Gerindra yaitu :

- a. **Kebangsaan (Nasionalisme)**, partai Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam segala aspek kehidupan berbangsa, baik kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan.
- b. **Kerakyatan**, partai Gerindra adalah partai yang dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia. Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan keniscayaan.
- c. **Religius**, partai Gerindra adalah partai yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai-nilai religious senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader partai Gerindra dalam bersikap dan bertindak.
- d. **Keadilan Sosial**, partai Gerindra adalah partai yang mencita-citakan suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.²

Atas dasar di ataslah konteks pemikiran partai Gerindra memiliki konsistensi yang tinggi mengenai sikapnya sebagai partai yang oposisi.

²Platform Partai Gerindra, <http://partaigerindra.or.id/uploads/Manifesto-Perjuangan-Partai-Gerindra.pdf>, diakses tanggal 26-08-2019.

Bahkan partai Gerindra tetap pada prinsipnya untuk mengkritik pemerintahan terhadap kebijakan yang dibuat apabila tidak bisa diterima oleh masyarakat.

2. *Competitiveness* (Daya Saing)

Daya saing memungkinkan partai oposisi dapat bekerja secara maksimal apabila oposisi sudah terkonsentrasi dan kepaduan diantara elemennya sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat berasaing, bukanlah orientasi psikologis para pelaku politik, melainkan cara keuntungan dan kerugian para lawan politik dalam pemilihan umum dan dalam parlemen yang dihubungkan satu sama lain.

Secara empiris harus dipahami bahwa kekuasaan eksekutif berpotensi menjadi birokratis dan tanpa pengawalan sebuah kekuatan oposisi, proses politik akan cenderung menjadi stagnan. Tetapi oposisi sebagai koalisi di dalam pemerintahan memudahkan memperoleh akses sumber daya politik dan ekonomi sebagai sumber pembiayaan partai. Sesuatu di sini salah satunya bisa dimaknai berupa akses terhadap sumber daya politik maupun finansial yang bisa diperoleh dengan memiliki pengaruh dan peranan pada kekuasaan. Di samping itu juga mampu untuk membantu meningkatkan dukungan suara partai jika pemerintahan yang di dukungnya berhasil dalam penilaian publik.

Partai Gerindra tentu tidak banyak menikmati tambahan akses atau sumber daya yang disebutkan tadi. Justru kesulitan akan hal itu bisa saja menjadi penghambat dalam proses politik lainnya. Tetapi, jika

pemerintahan itu sendiri gagal dalam mengelola kekuasaannya tentu saja ini menjadi *starting point* bagi partai oposisi untuk mendapatkan simpati rakyat. Artinya, jika partai pengusung atau gabungan partai pemerintahan yang berkuasa tidak berhasil dan gagal, bisa saja pemilu berikutnya akan ada hukuman dari rakyat, yaitu diberikannya kekuasaan kepada partai oposisi. Sebab dukungan rakyat menjadi keuntungan dalam bentuk kemauan untuk memilih.

Perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu 2009 ke 2014 mengalami hasil yang positif, meskipun di pemilu di tahun 2014 calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari koalisi Partai Gerindra kalah namun dalam pemilihan legislatif mendapatkan perolehan suara yang tinggi.

Tabel II.1
Presentase Perolehan Suara Partai Politik pada Tahun 2009 dan 2014

No	Partai Politik	Presentase Suara Tahun 2009	Presentase Suara Tahun 2014
1.	Partai Nasdem	-	6,72%
2.	PKB	4,95%	9,04%
3.	PKS	7,89%	6,79%
4.	PDI Perjuangan	14,01%	18,95%
5.	Partai Golkar	14,45%	14,75%
6.	Partai Gerindra	4,46%	11,81%
7.	Partai Demokrat	20,81%	10,19%
8.	PAN	6,03%	7,59%
9.	PPP	5,33%	6,53%
10.	Partai Hanura	3,77%	5,26%
11.	PBB	1,79%	1,46%
12.	PKPI	0,90%	0,91%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

3. *Location* (Lokasi)

Karena oposisi mencoba mengadakan perubahan dalam tingkah laku pemerintah, maka ia akan mempergunakan beberapa sumber daya politiknya untuk mengajak, mendorong, atau memaksa pemerintah untuk mengubah tindakannya. Situasi atau keadaan dimana oposisi mempergunakan sumber dayanya untuk mengadakan suatu perubahan dapat dinamakan lokasi pertarungan antara oposisi dan pemerintah.

Dalam pengertian ini tentu saja lokasi yang dimaksud adalah wilayah lembaga tinggi negara, antara legislatif dan eksekutif. Selain itu pada wilayah pemilu, yakni pemilihan umum Kepada Daerah. Perlawanan yang dilakukan partai oposisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo tergambar jelas pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Pembangunan Infrastruktur misalnya, dimana perdebatan antara parlemen yang mewakili partai oposisi sangat bersikap tegas untuk mengkritik kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan anggaran yang akan digunakan dan manfaat yang didapatkan. Legislatif tidak saja bekerja sebagai pengawas tetapi juga menyampaikan aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Partai Gerindra melakukan langkah-langkah kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut juga terjadi pada isu harga BBM, maka pada wilayah lokasi pertarungan oposisi dengan penguasa terjadi. Tetapi hal menarik berikutnya, bahwa tidak saja pada satu lokasi saja di parlemen.

4. *Characteristic (Ciri Khas)*

Pada hakikatnya oposisi itu sangat diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Peran partai oposisi akan memberikan warna sendiri dalam menjalankan proses politik. Indonesia misalnya, sistem presidensial sebenarnya didesain supaya ada oposisi, supaya semuanya tidak berada di sekitar eksekutif, agar parlemen punya kemampuan untuk mengkritisi eksekutif. Memang tantangannya adalah karena jarak ideologis antar partai di Indonesia itu tidak berbeda jauh, kemudian kebijakan antar partai baik dibidang politik, sosial, budaya, ekonomi itu juga tidak terlalu jauh maka kecenderungan partai-partai untuk ikut ke dalam pemerintahan itu lebih besar.

Hanya saja memang apakah oposisi ini bersifat yang permanen seperti di Inggris misalnya secara langsung yang kalah memang jadi oposisi, sementara yang terjadi di Indonesia sifatnya temporer dan kasusistik dia mungkin bisa loyal terhadap satu kasus tapi tidak segan kasus yang lain, dia bisa menjadi orang yang kritis dalam satu kasus tetapi jadi pengikut yang lain.

Dalam sistem presidensial anggota koalisi yang sama itu dapat menjadi kritis atau bersebarangan dengan pemerintah, sebagai contoh adalah PAN. Sebagaimana diketahui pasca pemilu 2014 PAN merupakan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Artinya dalam segi substansi, oposisi dapat dimaknai sebagai sikap kritis atau berbeda atau bertentangan dengan Presiden. Oleh sebab itu sistem

presidensial mendesain legislatif sebagai bagian dari oposisi terhadap eksekutif secara sistem.

Indikator atau faktor yang mempengaruhi partai Gerindra tetap mempertahankan sebagai partai oposisi atau di luar pemerintahan adalah:

a. Pemilihan umum Presiden 2014.

Kembali Menjadi Oposisi Periode 2014-2019



Kalah dalam Pilpres 2014, tidak menggerus suara Partai Gerindra saat Pemilu 2014. Nyatanya suara Partai Gerindra naik signifikan saat Pileg 2014. Gerindra meraup 14.760.371 suara atau 11,81 persen.

**Gambar II.1
Gerindra Kembali jadi Oposisi 2014-2019³**

Seperti diketahui hasilnya, meskipun kecewa karena pihak penyelenggara Pemilu kami anggap melakukan ketidacermatan dengan membiarkan kecurangan-kecurangan yang terjadi terstruktur dan juga terorganisir sistematis. Oleh karenanya dari latar belakang seperti itu yang menjadi alasan partai Gerindra berada di luar pemerintahan. Bagi Gerindra, berada di luar pemerintahan sama dengan berada di dalam pemerintahan. *Pertama*, kami tidak ingin masyarakat mempunyai anggapan bahwa kami haus kekuasaan, kita ingin justru mengawasi

³ Sejarah oposisi partai Gerindra, <https://www.merdeka.com/politik/menengok-sejarah-gerindra-yang-selalu-pilih-jadi-oposisi.html> diakses tanggal 02-09-2019

jalannya pemerintahan, dengan begitu akan lebih baik juga untuk pemerintah. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang bagus kita akan mendukung, kalau ada kebijakan yang kurang bagus kita kritisi dan koreksi itulah yang kami lakukan. Tentu kita mempunyai berbagai macam daftar dari janji-janji kampanye yang kami bukukan, ada 100 janji Presiden Joko Widodo. Dengan begitu tahu mana janji yang terealisasi dan tidak. Sebagian besar janji itu adalah janji-janji yang bagus. Tapi sejauh ini belum banyak terealisasikan.

b. Platform



Gambar II.2
Platform Politik Gerindra

Partai Gerindra dan Prabowo sendiri mempunyai platform yang tidak sama dengan pemerintahan. Prabowo mengemukakan, dasar pikiran atau platform Gerindra memang dekat dengan cita-cita dan pandangannya mengenai ekonomi kerakyatan serta kembali ke Pasal 33 UUD 1945 versi 18 Agustus 1945. Rohnya UUD 1945 harus ditegakkan. Kita kehilangan arah. Kita lebih kapitalis dari negara-negara kapitalis, para kapitalis di

Indonesia tumbuh tidak terkendali. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang borjuis dan ini yang akan diperbaiki. Gerindra memiliki platform memihak rakyat kecil secara jelas dan tegas.

c. Ideologi

yakni tentang kemandirian, penolakan terhadap dominasi asing, tentang penyalahgunaan anggaran negara, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu menjadi masalah yang prinsip. Presiden Joko Widodo dianggap sebagai sosok symbol yang didukung oleh kekuatan-kekuatan konglomerat Tiongkok, maupun kekuatan politik dan ekonomi *multi national corporation*. Dalam bentuknya yang terbaru disebut kapitalisme Negara.

d. Pengkhianatan Megawati Soekarnoputri



Gambar II.3
Jejak Politik Megawati dan Prabowo⁴

Tahun 2009 sebuah perjanjian tertulis antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto disahkan, dalam poin terakhir dari

⁴ Jejak Politik Megawati dan Prabowo, <https://tirto.id/perjanjian-batu-tulis-pilgub-dki-jejak-politik-megawati-prabowo-dabP>, diakses tanggal 02-09-2019

perjanjian tersebut Megawati Soekarnoputri beserta partai PDIP berjanji untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai Presiden di Pemilihan Presiden tahun 2014. Namun Pemilihan Presiden tahun 2014 Megawati Soekarnoputri mencalonkan Joko Widodo selaku Presiden, hal ini dianggap sebuah pengkhiatan oleh Prabowo Subianto sehingga membuat Prabowo Subianto beserta partai Gerindra untuk memutuskan hubungan koalisi dengan PDIP dan mengambil keputusan untuk melawan koalisi PDIP di Pemilihan Presiden tahun 2014.

5. *Purpose (Tujuan)*

Dalam pandangan Dahl, oposisi bertujuan untuk menentang suatu perubahan yang mungkin terjadi dalam; *pertama*, personalia pemerintahan; *kedua*, kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah; *ketiga*, struktur sistem politik; *keempat*, struktur sosial ekonomi. Walaupun kategori ini sama sekali bukan merupakan hal yang pasti dilakukan oleh oposisi diseluruh negara, tetapi untuk kepentingan penyederhanaan ini setidaknya memudahkan oposisi mencapai tujuannya. Padangan Dahl seperti di atas tidak bisa dijadikan suatu pedoman yang baku, tetapi tergantung pada realita yang ada.

Pada konteks Indonesia, oposisi tidak dapat dijadikan alat untuk menjatuhkan suatu pemerintahan, sebab pada masa pemerintahan Presiden sudah dalam UUD 1945 yaitu lima tahun masa jabatan Presiden dalam

satu periode.⁵ Adapun keinginan untuk menrunkan Presiden itu harus ada syarat yang tentunya melibatkan seluruh partai politik yang ada di Parlemen. Dengan begitu, tidak mungkin dilakukan oleh partai Gerindra untuk bertujuan menjatuhkan Presiden.

Partai oposisi di Indonesia cenderung memiliki tujuan jangka pendek sebab hitung-hitungannya masih pragmatis. Karenannya, kualitas oposisi dan kehidupan politik bangsa kita masih pada level dalam pengertian sebagai cara atau alat *bargaining power*. Tujuan jangka pendek ini biasanya tidak terlihat, tetapi bisa dalam bentuk investasi untuk pemilu yang akan datang yakni pada tahun 2019.

Hal senada sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arif Puyono. Arif menegaskan jika kader partai Gerindra sejak partai itu berdiri, tujuan hanya satu yaitu mengantarkan Prabowo sebagai presiden dan hanya menginginkan kader-kadernya di pemerintahan kalau Prabowo menjadi presiden.⁶ Namun hal itu tidak bisa dijadikan sebuah tinjauan baku mengenai tujuan partai Gerindra berada pada sikap oposisi, karena sampai saat ini kader-kader partai Gerindra termasuk golongan mayoritas di lembaga legislatif maupun eksekutif.

6. Strategy (Strategi)

Apa yang dimaksudkan Dahl mengenai pola oposisi adalah suatu rangkaian yang tak terpisahkan antara satu sama lainnya. Pola tersebut

⁵ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 7, hal 6

⁶ Gerindra Memilih Oposisi, <http://www.muslimbersatu.net/2017/01/gerindra-ditawari-4-posisi-menteri.html> diakses tanggal 01-07-2019.

akan membentuk suatu keputusan dan sikap yang pada akhirnya, oposisi memusatkan perhatiannya kepada persaingan ketat dengan jalan berusaha untuk memperoleh jumlah suara dalam pemilihan umum, setidaknya untuk memenangkan kursi di Parlemen.

Dalam kasus di Indonesia hal ini sudah pernah dilakukan dan cukup berhasil ketika Parlemen dalam pembahasan UUD MD3 dimana sempat terjadi ketentuan antara pemerintah dengan lembaga legislatif. Oposisi yang masih dalam satu kesatuan di KMP sangat dominan jumlahnya, ketimbang partai pendukung pemerintah saat itu. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama sebab partai koalisi KMP satu persatu lebih memilih bergabung dengan pemerintahan. Oleh sebabnya, memanfaatkan anggota perwakilan rakyat dari partai Gerindra yang ada di Parlemen adalah suatu upaya yang rasional mengingat strategi ini adalah langkah yang konstitusional dan rakyat juga akan menilai bahwa ini adalah hal yang sangat aspiratif.

Selain itu, kendati mengambil posisi sebagai oposisi di pemerintahan, Partai Gerindra ternyata tetap disukai oleh masyarakat. apalagi figur Prabowo Subianto, yang hanya kalah tipis dari Joko Widodo pada pertarungan Pilpres lalu, masih dianggap figur yang kuat untuk Gerindra memperoleh dukungan publik.⁷ Strategi oposisi inilah yang menjadi pilihan untuk tetap mendapatkan keuntungan electoral pada saat pemilihan umum nanti, khususnya pada pemilihan Presiden 2019.

⁷Alasan Gerindra Masih disukai Rakyat, <http://partaigerindra.or.id/2016/03/31/ini-alasan-mengapa-gerindra-masih-disukai-rakyat.html> diakses tanggal 02-07-2019.

Sehingga apa yang dilakukan oleh partai Gerindra adalah upaya dalam melakukan sebuah publik opini yakni pendapat kelompok masyarakat yang diperoleh melalui sebuah diskusi-diskusi ditangan masyarakat, yang tentu saja menguntungkan bagi partai Gerindra ketika menyangkut masalah pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

B. BENTUK OPOSISI PARTAI GERINDRA

Setelah melakukan analisis terhadap sifat oposisi partai Gerindra maka penulis akan memberikan deskripsi dan gambaran mengenai bentuk oposisi yang diperankan oleh partai Gerindra, bentuk oposisi yang dimaksudkan disini adalah perilaku konkret dari sikap oposisi partai Gerindra, dapat ditinjau dari beberapa sumber yang mendukung.

Dalam melihat bentuk oposisi dari partai Gerindra secara konkret maka diperlukan suatu tanggapan yang bersifat politik dari kader-kader partai Gerindra terhadap beberapa kebijakan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Maka dari itu penulis telah merangkum beberapa bentuk oposisi partai Gerindra dari dalam dan luar Parlemen :

1. Bentuk Oposisi Partai Gerindra didalam Parlemen

a. *Walk Out* dari Rapat Kerja DPR RI Komisi III Bersama Kapolri

Partai Gerindra melakukan aksi *Walk Out* dalam rapat kerja DPR RI Komisi III bersama dengan Kapolri. Aksi *Walk Out* partai Gerindra dipicu karena usulan anggota fraksi partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta untuk rapat kerja tersebut dilangsungkan secara tertutup namun

usulan tersebut tidak diterima oleh forum dan tetap membiarkan rapat tersebut berjalan secara terbuka.



Gambar III.1
Fraksi Gerindra walk out dari rapat kerja

“Ya sudah kalau begitu Fraksi Gerindra mungkin memutuskan untuk tidak ikut Raker pada saat ini. Kami akan ikut Raker kalau kemudian diakomodir oleh pimpinan atau pada saat komisi III sudah mempunyai ketua komisi III yang baru. Fraksi Gerindra mohon maaf kepada Kapolri dan jajaran kami tidak dapat mengikuti raker hari ini”⁸

b. Walk Out saat Pengesahan RUU Pemilu

Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 20 Juli 2017 dengan agenda pengesahan diwarnai dengan aksi *walk out* yang dilakukan 4 fraksi, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Aksi *walk out* dimulai dengan pernyataan sikap fraksi PAN yang disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto lalu disusul oleh 3 fraksi lainnya, sehingga pengesahan RUU Pemilu tersebut hanya diikuti oleh 6 fraksi yang tersisa dan memilih *voting* yang sama (aklamasi) dengan keputusan

⁸ Partai Gerindra Walkout saat rapat kerja,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/19/fraksi-gerindra-walk-out-saat-rapat-kerja-komisi-iii-dengan-kapolri>, diakses tanggal 28-08-2019

yaitu sistem pemilu terbuka *presidential threshold* 20-205%, ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara *sainte lague* murni dan kursi dapil 3-10 kursi.

Aksi *walk out* ini ditanggapi oleh partai Gerinda yang disampaikan oleh Fadli Zon menurutnya RUU Pemilu perlu dikaji lagi secara mendalam dan aksi *walk out* murni dilakukan oleh keputusan partai Gerindra sendiri tanpa ada arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

*“Nanti tim kajian hukum kami yang akan melakukan suatu kajian hukum terhadap UU ini, dari Gerindra...Enggak. Itu keputusan kami (Partai Gerindra). Kami yang minta”*⁹

2. Bentuk Oposisi Partai Gerindra diluar Parlemen

a. Kritik Dinamika Harga BBM

Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo bertekad melakukan reformasi di sektor energy. Salah satunya dengan mencabut subsidi untuk bahan bakar minyak jenis premium yang kurang tepat sasaran karena lebih dari 70% penerimanya bukan orang miskin. Pada 17 November 2014, Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan bahwa pihaknya berani tidak populer dengan mengumumkan sendiri kenaikan harga premium dan solar.

Selain mencabut subsidi untuk premium, Presiden Joko Widodo juga mengganti skema subsidi solar menjadi subsidi tetap sebesar Rp.1.000/liter. Dengan begitu, harga premium dan solar akan naik turun

⁹ Partai Gerindra *walk out* saat pengesahan RUU Pemilu, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/15210291/gerindra-walk-out-dalam-pengesahan-uu-pemilu-ini-respons-prabowo>, diakses tanggal 28-08-2019

mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Tapi kebijakan itu hanya berjalan selama 1,5 tahun april 2016. Kebijakan ini tentu saja menuai banyak kritik dari kalangan luar pemerintahan, terutama bagi partai Gerindra yang sangat dominan mengkritik kebijakan tersebut, berikut tanggapan yang diberikan oleh partai Gerindra terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pencabutan subsidi BBM sehingga mengalami kenaikan harga :

Pertama, Fadli Zon sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Menurut Fadli Zon kenaikan harga BBM tersebut sangat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Dirinya mengambil langkah bersama partai Gerindra untuk menolak keras kenaikan harga BBM.

Fadli Zon: Kenaikan harga BBM menambah kesengsaraan rakyat!

Kamis, 2 April 2015, 12:11

Reporter : Juven Martua Sitompul



© 2015. All rights reserved.

Gambar III.2
Fadli Zon Kritik harga BBM

“saya kira bbm merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Kenaikan BBM ini merupakan satu hal yang sangat kita sesalkan, karena menambah kesengsaraan rakyat....Jadi hal ini Komisi VII segera

mengambil satu sikap. Gerindra sendiri sudah menyatakan kenaikan BBM ini harus dibatalkan”¹⁰

Selain itu Fadli Zon dalam waktu berbeda memberikan juga kritik terhadap kenaikan harga BBM tersebut dalam sebuah cuitan di Media Sosialnya dengan membuat sebuah bait lagu yang mirip dengan lagu naik-naik ke puncak gunung.

“Naik naik BBM naik, tinggi-tinggi sekali, naik naik listrikpun naik tinggi tinggi sekali, naik baik pajak pun naik, tinggi tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara 2x”¹¹

Kedua, Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Dalam komentar Ahmad Muzani menilai langkah yang diambil pemerintah merupakan cerminan jika pemerintah menganggap remeh dampak dari lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, selain itu Ahmad Muzani lebih menyoroti kenaikan harga BBM di masa pemerintahan Joko Widodo dibanding kenaikan harga BBM pada sebelum-sebelumnya.



Gambar III.3
Ahmad Muzani kritik harga BBM

¹⁰ Fadli Zon Kritik Kenaikan Harga BBM, <https://www.merdeka.com/politik/fadli-zon-kenaikan-harga-bbm-menambah-kesengsaraan-rakyat.html>, diakses tanggal 26-08-2019.

¹¹ Fadli Zon Kritik Kenaikan harga BBM, <http://politiktoday.com/kritik-kenaikan-harga-bbm-fadli-zon-naik-naik-bbm-naik-tinggi-tinggi-sekali/>, diakses tanggal 29-06-2019.

“Pemerintah tidak pernah menganggap ini sebagai sebuah problem serius seperti pemerintah ketika kita mengingatkan itu bahkan dengan nyinyir, enteng-enteng saja bahwa itu adalah problem yang bisa diatasi.... Iya saya kira hari ini masyarakat dikejutkan dengan kenyataan bahwa bbm naik kurang lebih pertamax 900 rupiah. Saya kira kenaikan ini sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya”¹²

Ketiga, Arief Poyuono selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dalam kritiknya Arief menganggap dinamika naik turun harga BBM merupakan suatu pencitraan politik dari Presiden Joko Widodo.



Gambar III.4
Arief Poyuono Kritik Harga BBM

“Kangmas Joko Widodo panik. Udah naikin BBM Premium subsidi belum sejam dibatalin lagi, ha ha ha, pencitraan banget.... Yang pasti sampai di mana Kangmas Joko Widodo bisa tahan nggak naikin BBM Premium, sebab BBM Premium harus Naik karena harga minyak dunia itu trennya terus naik dan di akhir tahun bisa hingga 100 USD/barrel”¹³

¹² Ahmad Muzani Kritik Kenaikan harga BBM, <https://www.suara.com/news/2018/10/10/224807/harga-bbm-naik-partai-gerindra-kritik-pemerintah>, diakses tanggal 26-08-2019.

¹³ Arief Poyuono kritik harga BBM, <https://news.detik.com/berita/d-4250921/kenaikan-harga-premium-tiba-tiba-ditunda-gerindra-jokowi-panik>, diakses tanggal 26-07-2019.

b. Kritik Pembangunan Infrastruktur

Dalam empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang gencar dilaksanakan, pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia. Dalam beberapa pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan program ini bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Namun kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan yang kurang tepat sasaran oleh partai Gerindra, hal ini diungkapkan dalam beberapa kritik dari kader serta anggota fraksi partai Gerindra, berikut tanggapannya :

Pertama, Ferry Julianto Wakil Ketua Umum Gerindra mengkritik bahwa prioritas pembangunan infrastruktur presiden Joko Widodo saat ini bukan untuk kepentingan rakyat.

Gerindra Kritik Prioritas Proyek Infrastruktur Jokowi

From Gerindra - @ Gerindra



Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan pekan lalu. Dua politikus yang sama-sama pernah menjabat TNI Angkatan Darat itu sepakat menjalin kebersamaan membangun kekuatan gerakan moral.

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Julianto mengatakan kewenangan tersebut dibarengi dengan kekhawatiran terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Baik menyangkut kehidupan ekonomi maupun sosial politik.

"Masyarakat sekarang sedang merasakan kesulitan hidup

Gambar III.5
Ferry Kritik Pembangunan Infrastruktur

“Prioritas pemerintah sekarang yaitu pembangunan infrastruktur juga dianggap kurang pas. Yang bangun pabriknya asing, terus tenaga

kerjanya asing, tapi yang bangun prasarana infrastrukturnya duit rakyat, ya yang untung bukan bangsa kita. Daendels juga bangun infrastruktur waktu itu kok”¹⁴

Kedua, Bambang Harya Soekartono anggota Fraksi Partai Gerindra, menurut dia pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran oleh presiden Joko Widodo dengan anggaran mencapai Rp.400 triliun. Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan dampak signifikan. Padahal anggaran itu lebih besar daripada masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya Rp 120 triliun. Selain itu Bambang juga mengkritik pembangunan infrastruktur tersebut juga membuat banyak kontraktor gulung tikar.



Gambar III.6
Harya Kritik Pembangunan Infrastruktur

“Tapi hampir dikatakan hasil dari infrastruktur ini belum maksimal. Kalau lihat swasembada pangan, ini infrastruktur kan berhubungan swasembada pangan, ternyata belum lebih baik....Jumlah kontraktor kita 45 ribu yang mati. UKM yang kolaborasi jadi koperasi mati, 40 ribu lebih

¹⁴Ferry kritik pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo, <https://news.detik.com/berita/3582602/gerindra-kritik-prioritas-proyek-infrastruktur-jokowi>, diakses tanggal 27-08-2019.

mati dalam 3-4 tahun ke belakang. PHK dari industri yang mendukung infrastruktur malah terjadi besar-besaran”¹⁵

Ketiga, Ahmad Riza Patria Ketua DPP Partai Gerindra mengungkapkan kritik serta pujiannya terhadap pembangunan di era Presiden Joko Widodo dalam ungkapannya pembangunan tersebut merupakan hal positif namun pembangunan tersebut menurutnya tidak semua tepat pada sasaran yang dapat mengakibatkan penggunaan anggaran belanja negara terbebankan sehingga dapat memberikan dampak mengkarak terhadap pembangunan tersebut.

3 Tahun Jokowi, Gerindra Kritik Infrastruktur dan Demokrasi



Gambar III.7
Riza Partia Kritik Pembangunan Infrastuktur

“Dari tiga tahun Jokowi konsentrasi Pak Jokowi ada yang positif, di antaranya membangun infrastruktur. Tapi masalahnya pembangunan infrastruktur itu tidak semuanya tepat arah dan tepat sasaran. Membangun infrastruktur itu membutuhkan dana yang besar, lokasi titik harus disesuaikan....Jangan sampai nanti kejadian pembangunan

¹⁵Anggota Fraksi Partai Gerindra kritik Pembangunan Infrastruktur, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190709135116-4-83648/gerindra-kritik-infrastruktur-jokowi-45-ribu-kontraktor-mati>, diakses tanggal 27-08-2019.

infrastruktur yang membutuhkan biaya yang mahal, mangkrak. Karena tidak didukung anggaran yang cukup”¹⁶

c. Kritik Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018

Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi isu panas di kalangan para pekerja buruh dan pekerja lainnya. Perpres ini mendapat kritik dari sejumlah organisasi pekerja maupun pemerintahan. Pemerintah sendiri berargumen bahwa pembaharuan Perpres ini ditujukan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat birokrasi perizinan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pemerintah tetap mengendalikan masuknya TKA ke Indonesia melalui sejumlah persyaratan seperti pendidikan, kompetensi, hanya menduduki jabatan tertentu dengan level menengah ke atas.

Kebijakan ini mendapatkan respon kurang baik oleh partai Gerindra melalui berbagai macam kritik, diantaranya adalah :

Pertama, Ferry Juliantono Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menegaskan bahwa perpres tersebut mengukuhkan yang masuk TKA, khususnya yang dari China adalah *Unskilled labor* atau buruh kasar, selain itu Ferry mengungkapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui perpres ini tidaklah masuk akal.

¹⁶Ketua DPP Partai Gerindra Kritiki Pembangunan infrastruktur, <https://kumparan.com/@kumparannews/3-tahun-jokowi-gerindra-kritik-infrastruktur-dan-demokrasi>, diakses tanggal 27-08-2019.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Berpotensi Melanggar Konstitusi

Laporan: Rizak Akbar

Selasa 17 April 2018 | 18:42 WIB



Gambar III.8
Ferry Kritik Perpres No.20 Tahun 2018

“Sebenarnya hal-hal seperti itu adalah hak dari Tenaga Kerja Indonesia, haknya buruh, haknya ke depan generasi muda di Indonesia. Tapi, kok kemudian mereka masuk dan menurut kami mengkhianati Pasal 27 UUD 1945 yang menjelaskan tentang masyarakat, rakyat butuh dan berhak atas pekerjaan....Misalnya saya mau investasi di Vietnam, kalau saya menggunakan tenaga kerja dari Vietnam kan lebih murah daripada saya membawa orang atau buruh pekerja dari Jawa saya bawa ke Vietnam, kan gak masuk akal saya bawa tenaga kerja dari Indonesia untuk investasi di Vietnam, kenapa saya tidak mempekerjakan orang Vietnam yang terang-terangan pasti biayanya lebih murah”¹⁷

Kedua, Heri Gunawan Ketua DPP Partai Gerindra melontarkan kritik keras atas Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 tersebut. Menurut Heri Presiden Joko Widodo telah sesat secara logika karena menerbitkan perpres yang bertujuan meningkatkan investasi, kebijakan ini juga dinilai mempermudah masuknya TKA yang akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

¹⁷ Partai Gerindra kritik Perpres No.20 tahun 2018, <http://kabar3.com/detail/7408/perpres-nomor-20-tahun-2018-berpotensi-melanggar-konstitusi>, diakses tanggal 27-08-2019.



Gambar III.9
Heri Gunawan Kritik Pembangunan Infrastruktur

“Seolah-olah dengan dimudahkannya TKA masuk ke Indonesia, maka investasi akan naik. Itu logika yang sesat. Mestinya, investasi memberi dampak pada terserapnya tenaga kerja local.... Saya khawatir dengan adanya perpres itu justru akan membuka lebar masuknya pekerja asing. Ujungnya, kesempatan kerja bagi rakyat sendiri makin tipis”¹⁸.

Ketiga, Fadli Zon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Fadli Zon yang selaku Wakil Ketua DPR RI saat itu menandatangani perpres tersebut, menurutnya meski perpres ini berujung pada peningkatan ekonomi namun kebijakan tersebut menjadi suatu ironi ketika banyak masyarakat hendak membutuhkan pekerjaan.

“Itu salah satu kebijakan yang sangat ironis dan menurut saya ini tidak pro-rakyat”¹⁹

Setelah mendeskripsikan dan menggambarkan sikap dan bentuk oposisi partai Gerindra dapat diketahui bahwa partai Gerindra sejak awal pembentukan

¹⁸ Partai Gerindra kritik Perpres No.20 tahun 2018, <https://www.jpnn.com/news/elite-gerindra-sebut-perpres-tka-bukti-jokowi-salah-logika>, diakses tanggal 27-08-2019.

¹⁹ Fadli Zon Kritik Perpres No.20 Tahun 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/11/07444811/gerindra-dan-pks-kritik-kebijakan-jokowi-soal-perpres-tenaga-kerja-asing?page=all> diakses tanggal 27-08-2019

sudah berada pada peran oposisinya terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga partai Gerindra merupakan partai yang belum pernah sama sekali berada dikoalisi pemerintahan. Selain mengedepankan tujuan negara, rakyat dan kekuasaan partai Gerindra berada di pihak oposisi secara tidak langsung memberikan dampak baik bagi demokrasi di Indonesia, karena oposisi bertujuan memberikan *check and balance* bagi pemerintahan sehingga pemerintahan mampu bekerja sesuai dengan aturan tanpa keluar dari jalurnya.